BAB II
TINJAUN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan menganai tinjau teori yang terdiri dari agropolitan, pengembangan agropolitan, Kawasan agropolitan, pengembangan wilayah dengan konsep agropolitan, agribisnis basis pengembangan agropolitan, tinjaun kebijakan yang terdiri dari tinjaun RTRW Kabupaten Bandung Barat dan penelitian yang pernah dilakukan.

2.1 Tinjaun Teori

2.1.1 Agropolitan

Agropolitan (Agro=Pertanian Politan=Kota) adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang yang mampu memacunya berkembangnya sistem dan usaha agribisnis sehingga dapat melayani, mendorong, menarik dan menghela kegiatan pembangunan pertanian (Agribisnis) di wilayah sekitarnya (Departermen Pertanian, 2003).

Kota pertanian (Agropolitan) berada dalam kawasan sentra produksi pertanian yang memberikan kontibusi besar terhadap mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya kawasan tersebut disebut sebagai kawasan agropolitan yang terdiri dari kota pertanian dan desa-desa sentra produksi pertanian disekitarnya. Batasan kawasan agropolitan tidak ditentukan oleh batasan administratife pemerintah tetapi lebih ditentukan oleh skala ekonomi yang ada. Dengan kata lain kawasan agropolitan adalah kawasan agribisnis yang memiliki fasilitas perkotaan (Departermen Pertanian, 2003).

Menurut Friedman dan Douglas pada tahun 1975 ada sebuah konsep agropolitan yang disebut Agropolitan Distric. Konsep Agropolitan Distric merupakan suatu daerah perdesaan yang mempunyai kepadatan penduduk sekurang kurangnya 200 jiwa per Km^2. Di dalam distrik biasanya akan dijumpai kota berpenduduk antara 10.000-50.000 jiwa. Batas-batas wilayah distric adalah commuting radius (lingkar pulang pergi) antara 5-10 Km. Ukuran-ukuran tersebut menjadikan penduduk disebuah distric umumnya berkisar 50.000-150.000 jiwa dan

pada mulanya sebagian penduduk bekerja dibidang pertanian. Konsep ini sangat cocok untuk pertanian khusunya di Indonesia.

Paradigma konsep agropolitan adalah hubungan perdesaan dengan kota-kota dapat mencapai suatu tingkat sinergisme sepanjang hubungan fungsional dari sub wilayah tersebut menghasilkan nilai tambah yang dapat direstribusikan melalui pengembangan suatu tatanan nasional yang secara benar menggambarkan status kelangkaan suatu sumber daya atau komoditas, apabila terjadi akumulasi modal, terdapat mekanisme pasar yang dapat mengalirkan modal kepada penggunaan yang dapat memberikan manfaat sosial terbesar, dan perkembangan pusat pertumbuhan (Kota) pada suatu tingkat akan mengalami diminishing return sehingga harus di batasi melalui mekanisme pasar (Hastuti, 2001).

Pengembangan Kawasan agropolitan sangat cocok untuk pengembangan wilayah perdesaan. Di mana konsep agropolitan ini tidak hanya sekedar untuk pembangunan fisik saja, akan tetapi juga untuk pengembangan masyarakat atau sumber daya manusia agar sumber daya manusia dapat berkembang dan bersaing dengan perkembangan zaman. Titik berat pembangunan masyarakat, khususnya masyarakat setempat memerlukan pendekatan yang bersifat integral dan terpadu, artinya pembangunan yang akan dilaksanakan tidak hanya menyangkut pembangunan struktur fisik, tetapi sekaligus pembangunan manusia dengan pendekatan berimbang. Pengembangan kawasan agropolitan harus mempunyai keterkaitan harmonis dengan kombinasi antara pendekatan yang top down dengan pendekatan bottom up yang bertujuan untuk mencapai efek ganda (multiplier effect). Prakarsa-prakarsa dari bawah tidak dapat diabaikan, karena merupakan invisible hand dalam menggerakan sumber daya - sumber daya yang ada sebagai kekuatan utama untuk mewujudkan pengembangan kawasan agropolitan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (Rivai, 2003).

Pengembangan Kawasan agropolitan untuk membantu keterkaitan spasial antara wilayah perdesaan dan perkotaan. Pengembangan Kawasan agropolitan juga merupakan untuk mengembangkan kegiatan perekonomian khususnya pertanian dengan memperkuat keterkaitan antara pertanian, bukan pertanian dan jasa – jasa penunjang lainnya agar saling membantu satu sama lainnya.

2.1.2 Pengembangan Agropolitan

Pengembangan agropolitan memfokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yaitu untuk menjamin tercapainya keamanan pangan, sandang, kesehatan dan pendidikan. Pendekatan kebutuhan dasar dilihat dari segi konsumsi yang prosedurnya dapat dilakukan dengan mengestimasi kebutuhan dasar dalam perhitungan material yang tepat (kalori, protein, meter persegi dalam ruang hidup) dan kemudian menghitungnya dalam nilai uang (Friedman 1979). Berdasarkan pada ukurannya, urban (kota) sebagai suatu keseluruhan mungkin meliputi suatu wilayah atau sub wilayah. Secara fisik kota agropolitan tidak berada secara nyata dengan daerah perdesaannya, sebagai suatu unit spasial yang menjadi ciri utamanya adalah kerapatan realtifnya dan struktur ekonomi (Friedman, 1979).

Konsep agropolitan menurut Friedmann sebagai berikut :

1. Sebagian besar rakyat hidup diperdesaan dan rakyat adalah kekayaan sesungguhnya dari suatu bangsa.
2. Sektor pertanian merupakan tulang punggung pembangunan dengan kontribusi lebih dari 30%.
3. Kemiskinan umumnya terjadi diperdesaan baik karena factor struktural maupun fungsional sehingga membangun wilayah perdesaan merupakan upaya untuk mengatasi kemiskinan.
4. Upaya untuk mengatasi kesenjanga antara kota dan desa terbukti kurang berhasil apa bila dimulai dari perkotaan.
5. Sumberdaya alam sebagian besar berada diperdesaan.

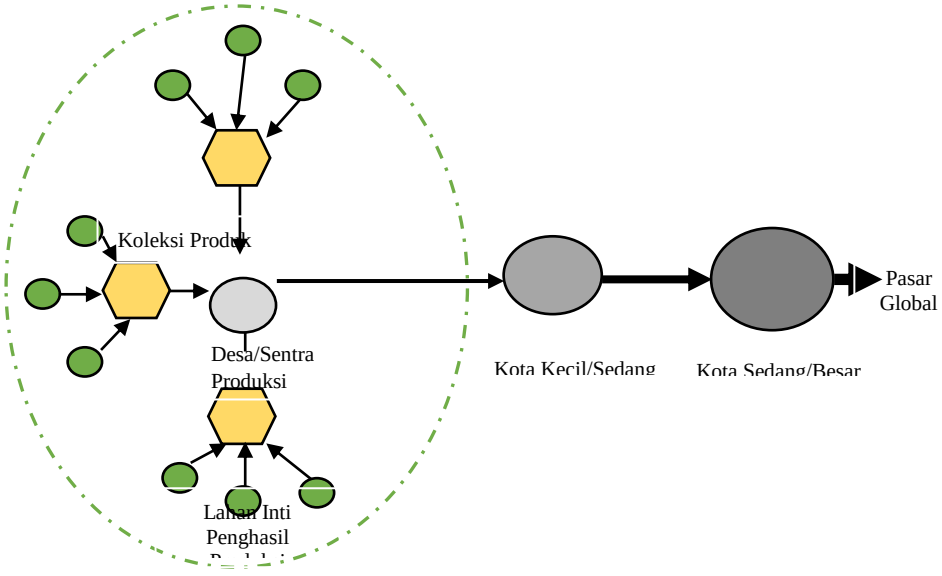
Sedangkan menurut Ertur (1984) Penekan utama dalam dalam penguatan agropolitan di dasarkan pada metode sebagai berikut :

1. Peningkatan produktivitas dan diversivikasi pertanian dan agroindustri.
2. Peningkatan partisipasi tenaga kerja.
3. Peningkatan permintaan barang dan jasa.
4. Peningkatan inovasi teknologi produksi.
5. Perluasan kapasitas untuk ekspor.

Pengembangan agropolitan diwilayah perdesaan pada dasarnya lebih ditujukan untuk meningkatkan produksi pertanian dan penjualan hasil-hasil pertanian, mendukung tumbuhnya agro processing skala kecil menengah dan mendorong keberagaman aktivitas ekonomi dari pusat pasar. Segala aktivitas harus diorganisasikan terutama untuk membangun keterkaitan antara perusahaan dikota dengan wilayah suplai diperdesaan dan untuk menyediakan fasilitas, pelayanan, input produksi pertanian dan aksesbilitas yang mampu memfasilitasi lokasi-lokasi permukiman di perdesaan yang umumnya mempunyai tingkat kepadatan yang rendah dan lokasinya lebih menyebar. Investasi dalam bentuk jalan yang menghubungkan lokasi-lokasi pertanian dengan pasar merupakan suatu hal yang penting yang diperlukan untuk menghubungkan wilayah antara perdesaan dengan pusat kota (Haryono, 2008).

Pengembangan agropolitan diartikan sebagai sistem fungsional desa-desa yang ditunjukan adanya tingkatan keruangan desa yakni pusat agropolitan dan desa-desa disekitarnya yang membentuk unit-unit pembangunan. Pengembangan Kawasan agropolitan di Indonesai dipertegas dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pasal 1 butir (24) UU Nomor 26 Tahun 2007 menjelaskan definisi Kawasan agropolitan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan tingkatan keruangan suatu sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

Gambar 2.1
Konsep Pengembangan Agropolitan
Dalam Keterkaitan Kota – Desa

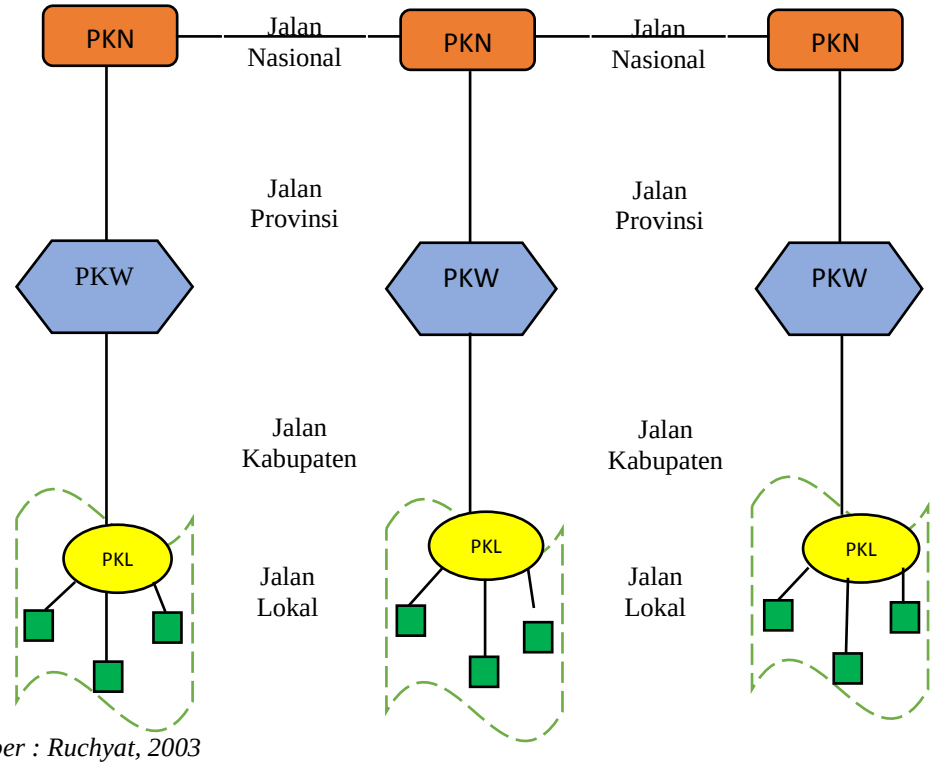


Sumber : Pedoman Pengelolaan Ruang Kawasan Sentra Produksi Pangan,2003.

Dari Gambar 2.1 merupakan sebuah Kawasan pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis dipusat agropolitan yang dapat dan mampu melayani kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian atau agribisnis diwilayah sekitarnya dalam aspek ekonomi wilayah. Iqbal dan Satiajie (2009:173) menjelaskan bahwa agropolitan adalah pengembangan wilayah terpadu yang mereflesikan interaksi dan keterkaitan aktifitas ekonomi yang secara spasial mengarah pada optimalisasi sumber daya dikawasan inti (kota) dan wilayah belakangnya (desa).

Dalam perkembangannya, Djakapermana tahun 2003 menjelaskan bawah kawasan agropolitan tidak bisa terlepas dari pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan nasional (RTRWN) dan sistem pusat kegiatan pada tingkat provinsi (RTRW Provinsi) dan kabupaten (RTRW Kabupaten). Pengembangan kawasan agropolitan dapat mendukung sebuah sistem yang terintegrasi, dilihat dari keterkaitan antara kota dari pergerakan barang, modal dan sumber daya manusianya sendiri. Keterkaitan tersebut dapat dilihat di Gambar 2.2.

Gambar 2.2
Konsep Pengembangan Agropolitan
Dalam Konnteks Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)



Sumber : Ruchyat, 2003

2.1.3 Kawasan Agropolitan

Defenisi agropolitan adalah kawasan yang merupakan sistem fungsional yang terdiri dari satu atau lebih kota-kota pertanian (agropolis) pada wilayah produksi pertanian tertentu, yang ditunjukan oleh adanya sistem keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan-satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis, terwujud baik melalui maupun tanpa melalui perencanaan formal. Agropolis adalah lokasi pusat pelayanan sistem kawasan sentra-sentra aktivitas ekonomi berbasis pertanian (Rustiadi, 2005)

Pengembangan agropolitan adalah suatu pendekatan pembangunan kawasan pedesaan melalui upaya-upaya menumbuhkan kota-kota kecil berbasis pertanian (agropolis) sebagai bagian dari sistem perkotaan dengan maksud menciptakan pembangunan berimbang dan keterkaitan desa kota yang sinergis dan pembangunan daerah. Tujuan dari pengembangan agropolitan sebagai konsep pembangunan wilayah dan perdesaan adalah :

1. Menciptakan pembangunan desa kota secara berimbang.
2. Menigkatkan keterkaitan desa kota yang sinergis (saling memperkuat).
3. Mengembangkan ekonomi dan lingkungan pemukiman perdesaan berbasis pertanian.
4. Pertumbuhan dan revitalisai kota kecil.
5. Diversifikasi dan perluasan basis peningkatan pendapatan kesejahteraan.
6. Menciptakan daerah yang lebih mandiri dan otonom.
7. Menahan arus perpindahan penduduk perdesaan ke perkotaan secara berlebihan (berkontribusi pada penyelesaian permasalahan perkotaan).
8. Pemulihan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Menurut UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengolahan sumberdaya tertentu yang ditujukan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan suatu sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

Kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan karakteristik wilayah pengembangan agropolitan adalah kriteria agropolitan yaitu :

1. Memiliki daya dukung dan potensi fisik kawasan yang memadai (kesesuaian

lahan dan agroklimat).

2. Memiliki komoditas dan produk olahan pertanian unggulan (minimal merupakan sektor basis di tingkat kabupatan/provinsi).
3. Luas kawasan dan jumlah penduduk yang cukup memadai untuk tercapainya economic of scale dan economic of scope (biasanya dalam radius 3-10 Km, mencakup beberapa desa hingga gabungan sebagian satu hingga tiga kecamatan).
4. Tersedianya prasarana dan sarana permukiman yang cukup memadai dalam standar perkotaan.
5. Tersedianya prasarana dan sarana produksi yang memadai dan berpihak pada kepentingan masyarakat lokal.
6. Adanya satu atau beberapa pusat pelayanan skala kota kecil yang terintegrasi secara fungsional dengan kawasan produksi disekitarnya.
7. Adanya sistem manajemen kawasan dengan ekonomi yang cukup, adanya sistem penataan ruang kawasan yang terencana dan terkendali.
8. Berkembangnya aktvitas-aktivitas sektor sekunder (pengolahan), dan tersier (jasa dan finansial).
9. Kelembagaan ekonomi komunitas lokal yang kuat, akses masyarakat lokal terhadap sumberdaya ekonomi (terutama lahan) mencukupi.

Menurut Pengelolaan Kawasan Sentra Produksi Pangan (2003), pengelolaan ruang agropolitan adalah upaya untuk mengatasi permasalahan dalam penataan ruang dan pengelolaan pertanian diperdesaan. Sistem dan tipologi kawasan dalam agropolitan yaitu kawasan lahan pertanian (hinterland), kawasan permukiman, kawasan pengolahan dan industri, kawasan pusat prasarana dan pelayanan umum, dan keterkaitan antara kawasan agropolitan dengan kawasan-kawasan lainnya disekitar. Tipoogi Kawasan agropolitan dipetakan berdasarkan potensi sektor unggulan usaha pertanian yang berkembang pada suata wilayah dapat dilihat di Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Tipologi Kawasan Agropolitan
Menurut Pedoman Pengelolaan Kawasan Sentra Produksi Pangan

No	Sektor Usaha Pertanian	Tipologi Kawasan	Persyaratan Agroklimat
1	Tanaman Pangan	Dataran rendah dan tinggi dengan tekstur lahan datar dan dilengkapi jaringan irigasi yang memadai.	Disesuaikan jenis komoditi yang dikembangkan dengan ketinggian lahan, jenis tanah, tekstur lahan, iklim dan tingkat keasaman tanah.
2	Hortikultura	Dataran rendah dan tinggi dengan tekstur lahan datar dan berbukit dan tersedia sumber daya air (baku) yang memadai.	Disesuaikan jenis komoditi yang dikembangkan dengan ketinggian lahan, jenis tanah, tekstur lahan, iklim dan tingkat keasaman tanah.
3	Perkebunan	Dataran tinggi dengan tekstur lahan berbukit dan dekat dengan Kawasan konservasi alam.	Disesuaikan jenis komoditi yang dikembangkan dengan ketinggian lahan, jenis tanah, tekstur lahan, iklim dan tingkat keasaman tanah.
4	Peternakan	Dekat Kawasan pertanian dan perkebunan dengan sistem sanitasi yang memadai.	Lokasi tidak boleh berada dekat dengan permukiman dan memperhatikan aspek adaptasi lingkungan.
5	Perikanan Darat dan Laut	Terletak pada perairan darat alam maupun buatan dan daerah pesisir pantai hingga lautan dalam batas wilayah zona ekonomi ekslusif perairan Indonesia.	Memperhatikan aspek keseimbangan ekologi dan tidak merusak ekosistem lingkungan yang ada.
6	Agrowisata	Pengembangan usaha pertanian dan perkebunan dikembangkan menjadi kawasan wisata alam tanpa meninggalkan fungsi	Disesuaikan jenis komoditi yang dikembangkan dengan ketinggian lahan, jenis tanah, tekstur lahan, iklim dan tingkat keasaman tanah.

No	Sektor Usaha Pertanian	Tipologi Kawasan	Persyaratan Agroklimat
		utamanya sebagai lahan pertanian produktif.	
7	Hutan Wisata Konservasi Alam	Kawasan hutan lindung di kawasan tanah milik negara, kawasan ini biasanya berbatasan langsung dengan lahan pertanian dan perkebunan dengan tanda batas wilayah yang jelas.	Sesuai dengan karakteristik lingkungan alam wilayah konservasi hutan setempat.

Sumber : Departermen Pertanian RI, 2003.

2.1.4 Konsep Agribisnis

Menurut pedoman pengelolaan ruang Kawasan sentra produksi pangan nasional dan daerah (agropolitan) dari Departemen PU, agropolitan diartikan sebagai upaya pengembangan Kawasan pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usah agribisnis yang diharapkan dapat melayani dan mendorong kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian atau usaha agribisnis diwilayah sekitarnya.

Agribisnis adalah suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keselurahan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil dan pemasaran yang ada hubungannya dalam pertanian dalam arti luas yang dimaksud dengan pertanian dalam arti luas adalah kegiatan usaha yang menunjang kegiatan pertanian dan kegiatan usaha yang ditunjang oleh kegiatan pertanian (Soekarwati, 2003). Agribisnis adalah kegiatan usaha dibidang pertanian yang berwatak bisnis, pelakunya secara konsisten berupaya untuk meraih nilai tambah komersial dan finansial yang berkesinambungan untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan pasar (Adjid, 1998).

Menurut Pasaribu (2012) sistem agribisnis terdiri dari beberapa sub sistem yaitu :

1. Sub sistem agribisnis hulu (*up stream agribisnis*), yakni industry-industri yang menghasilkan barang-barang modal bagi pertanian (industri

perbenihan/pembibitan tumbuhan dan hewan, industri agrokimia (pupuk, pestistida, obat/vaksin ternak) dan industri agrootomotif (mesin dan peralatan pertanian) serta industri pendukungnya).

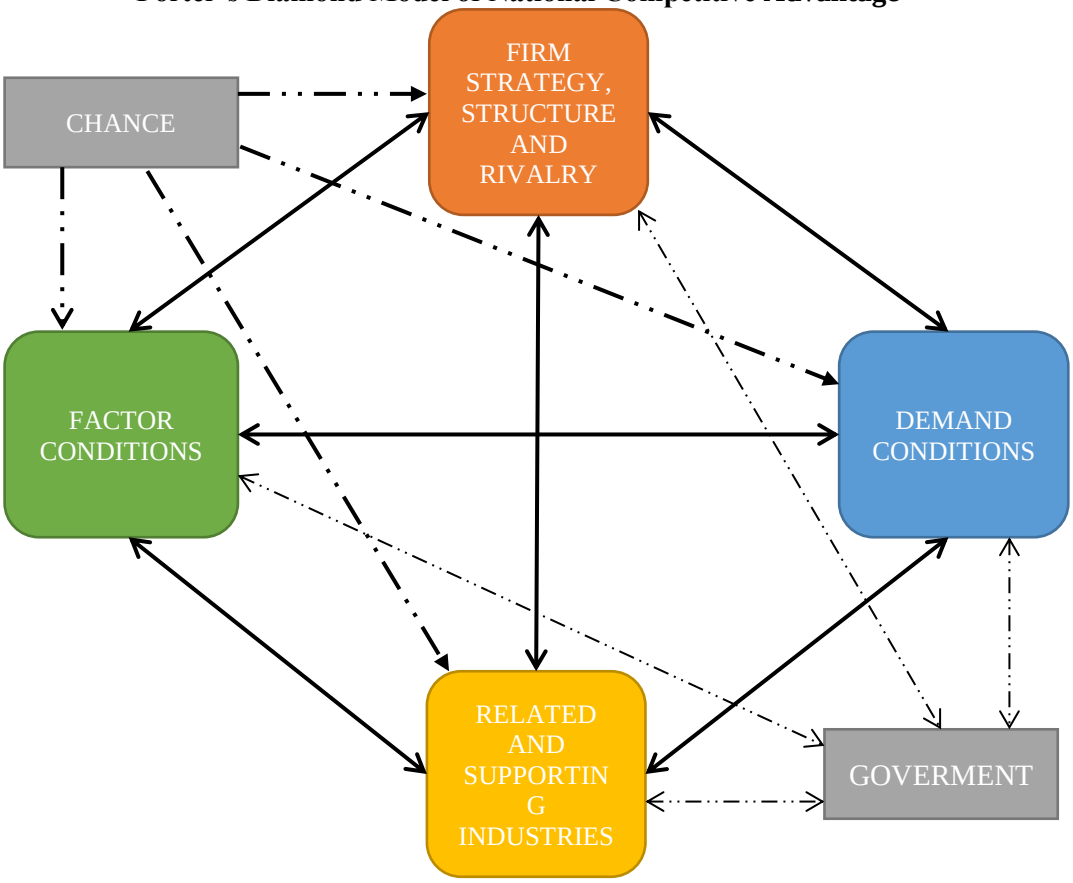
2. Sub sistem usaha tani *(on farm agribisnis*), yakni kegiatan yang menggunakan barang-barang modal dan sumber daya alam untuk menghasilkan komoditas pertanian primer (usaha tani tanaman pangan dan hortikultura, usaha tani tanaman obat-obatan, usaha tani perkebunan, dan usaha tani peternakan, usaha perikanan dan usaha kehutanan).
3. Sub sistem agribisnis hilir (*down stream agribisnis*), yakni industri yang mengolah komoditar pertanian primer (agroindustri) menjadi produk olahan baik produk antara (*intermediate product*) maupun produk akhir (*finish product*) (industri makanan, industri minuman, industri barang-barang serat alam (barang-barang karet, plywood, pulp, kertas, bahan-bahan bangunan terbuat dari kayu, rayon, benang dari kapas/sutera, barang-barang kulit, tali, dan karung goni), industri biofarmaka dan industri agrowisata dan estetika.
4. Sub sistem pemasaran, yakni kegiatan-kegiatan untuk memperlancar pemasaran komoditas pertanian, baik segar maupun olahan didalam dan diluar negeri (komoditas dari sentra produksi ke sentra konsumsi promosi, informasi pasar, serta inteljen pasar (*market intelligence*).
5. Sub sistem jasa yang menyediayakan jasa bagi sub sistem agribisnis hulu, sub sistem usaha tani, sub sistem agribisnis hilir (penelitian dan pengembangan, perkreditan dan asuransi, transportasi, Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, system informasi dan dukungan kebijaksanaan pemerintah (mikro ekonomi, tata ruang, makro ekonomi).

2.1.5 Supply Chain

Supply chain merupakan hubungan ke hulu (pemasok) dan ke hilir (Konsumen) dengan tujuan untuk memberikan nilai yang unggul kepada konsumen dengan biaya yang minimum pada rantai pasokan secara keseluruhan (Christoper, 2011). Menurut porter (1985) suatu perusahaan dapat mengaitkan rantai nilai perusahaan dengan supply chain yaitu dengan menerapkan sistem agar sumber bahan baku atau sumber jasa tersedia saat dibuthkan.

Menurut Porter (1990) dalam persaingan global saat ini, suatu bangsa atau negara yang memiliki *competitive advantage of nation* dapat bersaing dipasar internasional bila memilik empat faktor penentu dan dua faktor pendukung. Empat faktor utama yang menentukan daya saing suatu komoditi adalah kondisi faktor (*factor condition*), kondisi permintaan (*demand condition*), industri terkait dan industri pendukung yang kompetitif (*related and supporting industry*), serta kondisi struktur, persaingan dan strategi industri (*firm strategy, structure, and rivaly*). Ada dua faktor yang mempengaruhi interaksi antara keempat faktor tersebut yaitu faktor kesempatan (*chance event*) dan faktor pemerintah (*government*). Secara Bersama-sama faktor ini membentuk sistem dalam pengingkatan unggulan daya saing yang disebut Porter's Diamond Theory.

Gambar 2.3
Porter's Diamond Model of National Competitive Advantage



2.2 Tinjaun Kebijakan

2.2.1 Tinjaun RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 – 2029

Rencana struktur ruang disusun untuk mewujudkan efesiensi pemanfaatan ruang, keserasian pengembangan ruang dan keefektifan sistem pelayanan. Khususnya penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Bandung Barat antara lain :

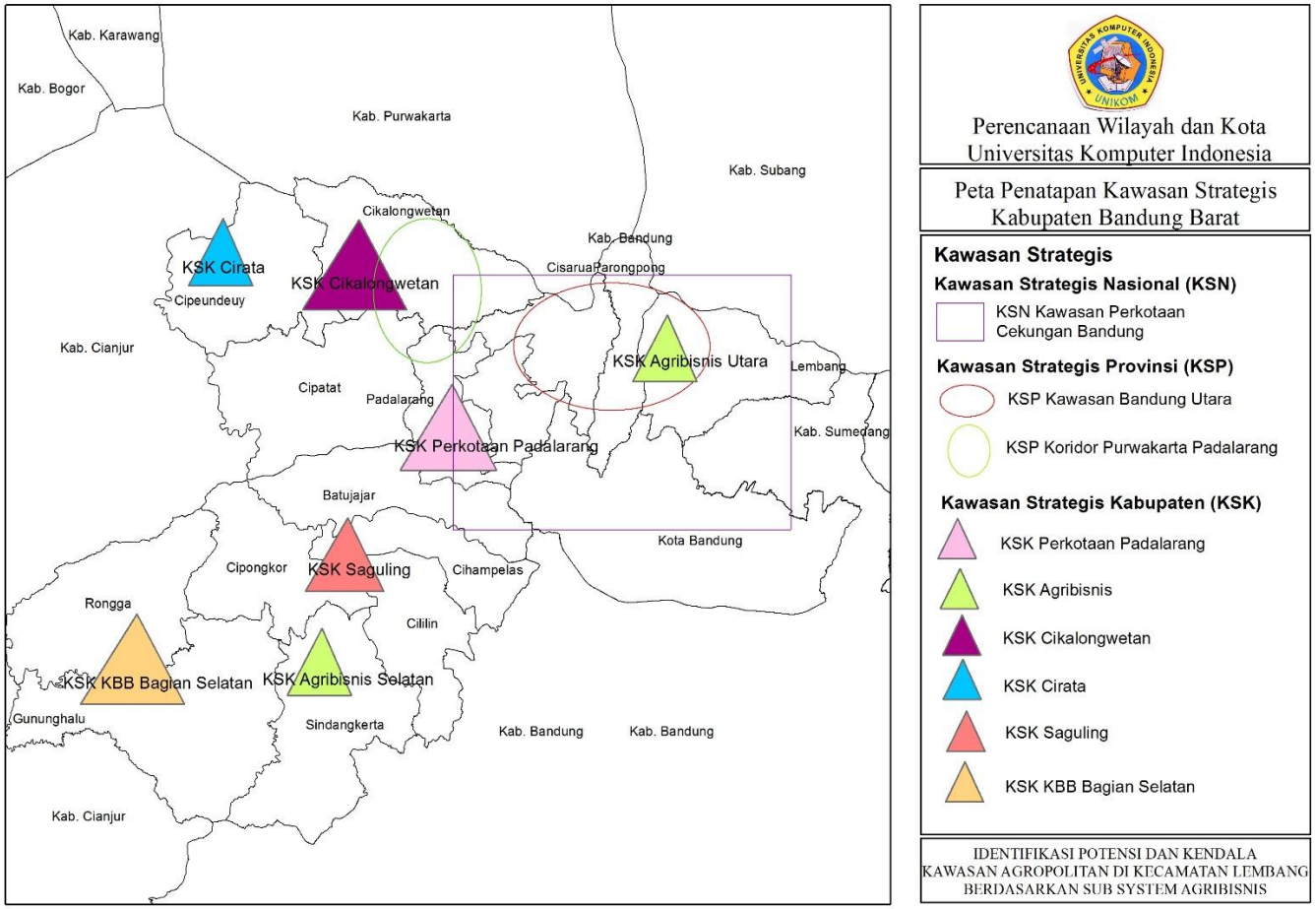
1. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten

   Kawasan strategis melihat dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi diantaranya :

   a. KSK Perkotaan Padalarang meliputi :
      - Kecamatan Padalarang
      - Kecamatan Ngamprah
      - Kecamatan Bajujajar
      - Kecamatan Cisarua

   b. KSK Cikalongwetan meliputi :
      - Kawasan Cikalongwetan terpadu
      - Kawasan Industri Cipeundeuy

   c. KSK Pusat Agribisnis meliputi :
      - Kawasan Agribisnis Lembang
      - Kawasan Agribisnis Cililin.



Gambar 2.4 Peta Kawasan Strategis Kabupaten Bandung Barat

Tabel 2.2
Rencana Penanganan Kawasan Strategis Kabupaten
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 – 2029

Nama Kawasan Stategis Kabupaten	Kawasan Pendukung	Rencana Penanganan
KSK Pusat Agribisnis	Kawasan Agribisnis Lembang (Bandung Utara)	• Pengembangan kegiatan pertanian terutama untuk jenis tanaman dan ternak yang sudah ada. • Pengembangan kegiatan pertanian diutamakan pada peningkatan hasil produksi, pengembangan kegiatan agroindustry. • Peningkatan prasarana yang menunjang kegiatan pertanian berupa prasaran jalan untuk meningkatkan akses menuju pasar dan pembangunan irigasi terutama untuk pengembangan tanaman pangan dan hortikultura. • Penanganan/penyelesaian konflik kepentingan sehubungan dengan tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang kegiatan budidaya. • Penggunaan untuk lahan pertanian dengan cara diversifikasi. • Pembangunan sub terminal agribisnis di Kecamatan Lembang.

Sumber : RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 – 2029

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak lepas dari studi yang telah dilakukan sebelumnya yang berguna untuk memberikan acuan serta referensi dalam proses penelitian ini, serta untuk melihat adanya kesamaan mengenai variebel maupun metode penelitian yang digunakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel 2.3.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Judul Skripsi/Tesis	Nama Mahasiswa	Universitas	Program Studi	Tahun	Metode	Hasil
1	Pengembangan Kawasan Agropolitan Ambulu Balung (AMBAL) Kabupaten Jember.	Ajeng Novi Ana Dewi.	Universitas Jember.	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.	2013	Input-Output, SWOT dan Analitychal Hierarchy Process.	Kabupaten Jember memiliki Ambulu dan Balung dalam penerapan kawasan agropolitan. Kedua kawasan ini memiliki hasil pertanian yang tinggi dan lokasi kedua daerah yang strategis. Analisis IO menunjukkan bahwa padi dan jagung adalah produk yang potensial dikembangkan di kawasan agropolitan AMBAL. Hasil analisis AHP berdasarkan identifikasi metode SWOT menunjukkan bahwa peningkatan utilitas merupakan alternatif yang paling penting untuk dikembangkan. Kawasan agropolitan AMBAL produk potensial untuk dikembangkan adalah padi dan jagung yang dikembangkan melalui peningkatan utilitas yang sesuai dengan konsep agropolitan dan agribisnis.
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan di Wilayah Rojonoto Kabupaten Wonosobo.	Laelatul Farhanah.	Universitas Negeri Semarang.	Ekonomi Pembangunan.	2015	Location Quotient, Analisis Shift Share, Statistik Deskriptif dan Analytical	Kecamatan Kaliwiro komoditas unggulannya cabai dan nanas, Kecamatan Sukoharjo komoditas unggulannya tomat, Kecamatan Leksono memiliki komoditas unggulan kelapa deres, kacang panjang, dan tomat, Kecamatan Selomerto

No	Judul Skripsi/Tesis	Nama Mahasiswa	Universitas	Program Studi	Tahun	Metode	Hasil
						Hierarchy Process.	memiliki komoditas unggulan sirsak, jengkol, jeruk dan nangka. Kendala pengembangan kawasan Agropolitan Rojonoto adalah kesulitan koordinasi di lapangan, penyuluh aktif menyebutkan kendala pembinaan sumber daya manusia petani, kondisi infrastruktur yang mulai rusak, serta pengetahuan petani yang masih perlu di tambah. Kendala dari petani paling banyak dikeluhkan adalah kondisi jalan usaha tani yang mulai rusak. Pengusaha pedagang banyak yang mengalami kendala pemasaran. Strategi pengembangan kawasan di wilayah Rojonoto Kabupaten Wonosobo dapat dilakukan dengan prioritas peningkatan sumber daya manusia, penyediaan input produksi, infrastuktur, kebijakan dan kelembagaan.
3	Potensi Sektor Pertanian dan Infrastruktur dalam Mendukung Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Pinrang	Sani Khairul	Universitas Islam Negeri Alauddin.	Perencanaan Wilayah dan Kota.	2013	Metode Kuantitatif, Kualitatif, Location Quotient, Skalogram, Indeks Sentralitas	Potensi sektor pertanian yang dimiliki Kabupaten Pinrang cukup besar, dimana sebagian besar penduduknya menggantungkan hidupnya di sektor tersebut serta sumbangan sektor pertanian terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Pinrang Rp. 1.612.321,45 (milyar) yang

No	Judul Skripsi/Tesis	Nama Mahasiswa	Universitas	Program Studi	Tahun	Metode	Hasil
						Terbobot dan Deskriptif.	sampai saat ini masih mendominasi dan untuk mata pencaharian penduduk terbesar Kabupaten Pinrang adalah di sektor pertanian 68,82%. Ketersedian infrastruktur wilayah yang ada di pusat dan sub pusat kawasan agropolitan di Kabupaten Pinrang untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis adalah seperti jalan, sarana irigasi/pengairan, sumber air baku, pasar, terminal, jaringan telekomunikasi, listrik, perbankan, pusat informasi pengembangan agribisnis, sarana produksi pengolahanhasil pertanian dan fasilitas umum serta fasilitas sosial lainnya. Di mana pemerintah Kabupaten Pinrang harus lebih memfalisitasi penyediaan infrastuktur agribisnis yang memadai karena di Pinrang memliki potensi yang sangat besar untuk menjadi Kawasan Agropolitan.
4	Analisis Strategi Pengembangan Agropolitan di Kabupaten Pandeglang.	Dian Atikah.	Universitas Negeri Islam Syarif Hidyatullah Jakarta.	Sosial Ekonomi Pertanian.	2004	Metode Deskriptif, Matriks EFE, IFE, SWOT dan QSPM.	Pengembangan agropolitan di Kabupaten Pandeglang yaitu strategi pengembangan pasar dan penetrasi pasar melalui kemitraan, Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian dengan adanya lahan

No	Judul Skripsi/Tesis	Nama Mahasiswa	Universitas	Program Studi	Tahun	Metode	Hasil
							pertanian yang cukup luas untuk meningkatkan produksi pertanian. pembangunan pusat pasar pertanian (subterminal agribisnis) yang berada di sentra procluksi pertanian rakyat untuk menunjang strategi pengembangan pasar. strategi pengembangan dan diversifikasi produk, strategi pengembangan lembaga ekonomi rakyat seperti usaha skala rumah tangga, kelompok asosiasi untuk menunjang strategi pengembangan produk, membuat profil investasi untuk pengusaha yang berminat memberikan kredit usaha, meningkatkan etos kerja dari jiwa kewirausahaan pelaku agribisnis. Membuat database potensi agribisnis Kabupaten Pandeglang sehingga dapat memperluas pasar clomestik clan intemasional. Peningkatan kesadaran dalam penerapkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kualitas produk khususnya pada pengolahan hasil penyimpanan dan grading produk untuk menunjang pengembangan produk.

No	Judul Skripsi/Tesis	Nama Mahasiswa	Universitas	Program Studi	Tahun	Metode	Hasil
5	Analisis Strategi Pengembangan Kawasan Agropolitan Kapet Bandungan Kabupaten Semarang.	Henia Rosidawati.	Universitas Diponorogo Semarang.	Ekonomika dan Bisnis.	2015	Metode Mix Methods.	Kondisi dan karakteristik Kawasan Agropolitan KAPET Bandungan Kabupaten Semarang secara umum adalah mengalami stagnasi atau tidak berkembang karena sub - sub sistem agribisnis tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Hasil analisis AHP menunjukkan bahwa urutan aspek prioritas strategi pengembangan Kawasan Agropolitan KAPET Bandungan adalah aspek subsistem jasa - jasa penunjang, distribusi dan pemasaran, usahatani, pengolahan hasil, dan agribisnis hulu. Prioritas alternatif strategi yang tertinggi adalah meningkatkan keterlibatan petani di kawasan dalam setiap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan dan kegiatan agropolitan.

No	Judul Artikel	Nama Penulis	Nama Jurnal	Vol (thn)	No	Hal	Metode	Hasil
1	Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta.	Bambang Trihartanto Suroyo dan Wiwandari Handayani.	Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota (ITB).	25 (2014)	3	243-261	Pengukuran tingkat kesejahteran petani, skala likert dan regresi linear berganda.	Untuk mengkaji keberhasilan pengembangan kawasan Agropolitan di Kabupaten Kulonprogo. Pengembangan Kawasan Agropolitan di daerah ini tidak terlihat dampak yang signifikan terhadap pembangunan perdesaan di Kabupaten Kulonprogo. Terlihat kesejahteraan petani di Kabupaten Kulonprogo masih di bawah rata rata. Factor yang mempengaruhinya adalah kurangnya sarana dan prasarana agribisnis seperti mesin pertanian, irigasi, pemasaran dan kondisi jalan, sehingga menjadi hambatan bagi petani untuk meningkatkan produktivitas serta daya beli petani.
2	Potensi Wisata Agro Kabupaten Bandung Berdasarkan Aspek Permintaan dan Penawaran.	Silvia Puspitasari	Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota (ITB).	22 (2011)	1	33-48	Aspek Penawaran (supply) menggunakan metode observasi lapangan dan aspek permintaan (demand) menggunakan metode penyebaran kuisioner.	Kabupaten Bandung memilik salah satu penghasil pertanian besar di Jawa Barat. Kabupaten Bandung melalui RIPPDA No 6 tahun 2006-2016 menetapkan Sembilan Kawasan Agro yaitu Desa Alamendah, Desa Panundaan, Desa Ciwidey, Desa Pasirjambu, Desa Sukawening, Desa Negkelan, Desa Rawabogo, Desa Malabar dan Pengalengan. Ada tujuh kawasan yang tergabung dalam

No	Judul Artikel	Nama Penulis	Nama Jurnal	Vol (thn)	No	Hal	Metode	Hasil
								kawasan Agropolitan Ciwidey dan terletak dalam satu jalur pariwisata Soreang-Patengan. Melihat potensi yang dapat dikembangkan di tujuh desa tersebut untuk menjadi destinasi wisata Agro. Melihat potensi tersebut melalui Supply and Demand. Penawaran yang diteliti mencakup daya tarik alam, budaya dan khusus, selain daya Tarik alam, ditinjau pula sarana dan prasarana serta aksesibilitas yang mencakup akses menuju kawasan dan akses di dalam kawasan. Sedangkan permintaan mencakup pola perjalanan, karakteristik wisatawan dan kebutuhan wisatawan akan wisata agro di Kabupaten Bandung. Menunjukkan bahwa secara umum, tujuh kawasan yang ditetapkan oleh RIPPDA memiliki potensi pertanian yang melimpah dan beragam, sehingga memiliki peluang besar dalam pengembangan wisata agro.
3	Pola dan Struktur Ruang Kawasan Agropolitan dalam	Sudaryono.	Jurnal Perencanaan	13 (2004)	2	1-14	Tidak menggunakan metode tapi melihat konsep pendekatan tata	Mengaplikasikan perspektif political ekonomi sebagai alat analisis untuk menjelaskan pola dan struktur ruang

No	Judul Artikel	Nama Penulis	Nama Jurnal	Vol (thn)	No	Hal	Metode	Hasil
	Perspektif Ekonomi Politik.		Wilayah dan Kota (ITB).				ruang agropolitan "manusia petani" sebagai sentrum dari tata ruang agropolitan. Ada 2 konsep Social Capital dan Agro Teritorial Capital.	Agropolitan. Konsep Agropolitan yang menetapkan petani sebagai sentrum dan klasifikasi dan tipologinya berdasarkan perspektif ekonomi polotik. Di mana konsep Agropolitan yang lahir dari paradigma utopian planning. Agropolitan menuntut adanya peran pemerintah yang kuat melindungi eksistensinya. Tanpa adanya perlindungan dari pemerintah terutama menyangkut aspek development control dan penguatan territorial based identities. Eksistensi wilayah Agropolitan sulit untuk di tegakkan, bertahan dan bahkan berlanjut.
4	Agropolitan Development in East Tomohon, North Sulawesi Indonesia.	Altje.E.Poli, Mohammad Bisri, Surjono and Edy Lengkong.	IOSR Journal of Business and Management (IOSR - JBM).	13 (2013)	3	35-40	Metode Observasi Lapangan.	Potensi wilayah agropolitan di Kabupaten Tomohon Timur terdiri dari pemukiman, hutan, Perkebunan, kebun buah dan sawah. Kawasan agropolitan Tomohon Timur sebagian besar terdiri dari areal perkebunan. Daerah semak-semak dominan dan menjadi Kesempatan untuk mengubah lahan tandus menjadi lahan produktif (yaitu agroforestry). Sumber daya kelimpahan wilayah agropolitan di

No	Judul Artikel	Nama Penulis	Nama Jurnal	Vol (thn)	No	Hal	Metode	Hasil
								Tomohon membuka peluang bagi daerah tersebut untuk memaksimalkan produk pertanian berdasarkan sistem agroforestry. Setiap komponen memiliki karakteristik dan peran khusus yang harus dikaitkan satu sama lain. Di mana untuk membangun kawasan agropolitan terpadu.
5	Development of Agropolitan Area Based on Local Economic Potential (A Case Study: Belajen Agropolitan Area, Enrekang District).	Haeruddin Saleh, Batarya Surya, Chalid Imran Musa, and H. Muhammad Azis.	Asian Journal of Applied Sciences	5 (2017)	1	1-16	Pendekatan Kualitatif, Pendekatan Kuantitatif dan Location Quetieon (LQ).	Kawasan agropolitan dengan pendekatan bottom-up dalam hal ini adalah proses perumusan kebijakan publik yang dimulai dari bawah, yang berarti bahwa semua permasalahan yang ada di kelas bawah (daerah) kemudian dibahas oleh Pemerintah mencari alternatif solusi sesuai kebijakan yang ada. Melalui pendekatan ini kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah efektif karena sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana produksi, kegiatan agribisnis dan pengembangan sumber daya manusia. Produktivitas pertanian masyarakat di wilayah agropolitan mengalami pertumbuhan dan dengan analisis kuantitatif, produk unggulan

No	Judul Artikel	Nama Penulis	Nama Jurnal	Vol (thn)	No	Hal	Metode	Hasil
								sebagai basis pengembangan kawasan agropolitan dapat ditentukan. Kemudian, penentuan model tersebut digunakan untuk melihat bagaimana proses kerja kawasan agropolitan yang ditentukan oleh infrastruktur, sumber daya manusia, kelembagaan, kebijakan dan potensi sumber daya alam

Sumber : Hasil Input 2018